

MENANTI KEBANGKITAN PERSUSUAN INDONESIA

Oleh
Teguh Boediyana
Ketua Dewan Persusuan Nasional

Dewan Persusuan Nasional :

Bahwa dalam membahas persusuan dalam webinar ini adalah persusuan yang terkait dengan peternakan sapi perah rakyat.

DPN secara konsisten menyatakan bahwa peternakan sapi perah rakyat pada saat ini dalam **keadaan darurat** atau dengan perkataan lain kondisi **lampu merah**. Hal ini antara lain diindikasikan dengan:

- a. Produksi susu yang cenderung stagnan .
- b. Populasi sapi yang masih rendah.
- c. Jumlah koperasi susu primer yang menurun dan saat ini hanya tinggal 55 buah yang sebagian besar menangani susu segar dibawah 20 Ton/hari.
- d. Pemasaran susu masih tergantung pada IPS.
- e. Produktivitas sapi masih rendah.
- f. dsb

DPN menganggap bahwa usaha peternakan sapi perah rakyat tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam porsi yang layak sejak tahun 1998. Kita dapat bandingkan dengan program swasembada daging sapi yang diperkirakan telah menghabiskan dana APBN sekitar Rp. 25 T sejak tahun 2005 dan hasilnya gagal. Peternakan sapi perah rakyat semakin termarginalisasi .

DPN melihat justru yang sedang dan akan bangkit adalah korporasi besar yang saat ini sudah merambah dari hulu sampai hilir. Mereka yang awalnya bermain hanya di segmen hilir sekarang menangkap peluang besar dan masuk di sektor hulu.

Dewan Persusuan nasional menganggap bahwa program pengembangan sapi perah rakyat oleh Pemerintah masih terbatas pada *das sollen* dan jargon jargon yang dituang dalam dokumen negara yang diberi nama *Blue Print* atau Cetak Biru.

Dari penelusuran diperoleh informasi tentang Cetak Biru yang disusun oleh pemerintah adalah :

1. *Blue Print* Pengembangan Agribisnis Persusuan 2008 – 2020. Disusun oleh Tim dari Fakultas Peternakan IPB dan Ditjen Peternakan.
2. *Blue Print* Persusuan Nasional 2010 – 2014. Proyek Ditjen Peternakan
3. Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013 - 2025 dari Kemenko Perekonomian. Disusun utamanya oleh tiga orang Guru Besar Fakultas Peternakan dari 3 Universitas.

Tampaknya *Blue Print* hanya seonggok dokumen dan tidak direalisasikan atau diimplementasikan sesuai dengan maksud penyusunannya. Hal ini tercermin bahwa target yang ditetapkan sangat jauh dari kenyataan kinerja. Selain *Blue Print* juga pernah Ditjen Peternakan dan KH mencanangkan Swasembada Susu tahun 2020.

RANCANGAN DALAM BLUE PRINT DAN KONDISI RIIL

Blue Print Pengembangan Agribisnis Persusuan 2008 -2020

Target tahun 2020 :

- | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1. Populasi sapi perah | : | <u>3,6 juta ekor</u> |
| 2. Produksi susu segar | : | <u>2,9 Juta Ton.</u> |

Kondisi riil di tahun 2020 (Data BPS 2019):

- | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1. Populasi sapi perah | : | <u>565.001 ekor</u> |
| 2. Produksi susu segar | : | <u>0,95 Juta Ton</u> |

Blue Print Persusuan Nasional 2010 – 2014

Target tahun 2014 :

- 1. Populasi sapi perah : 955.841
ekor
- 2. Produksi susu : 1,2 juta Ton

Kondisi riil tahun 2014 (Data BPS)

- 1. Populasi sapi perah : 502.516
ekor
- 2. Produksi susu segar : 0,8 Juta
Ton

Blue Print Persusuan Indonesia 2013 – 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian :

Target pencapaian di tahun 2020 :

- | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 1. Populasi sapi | : | <u>1,4 juta ekor.</u> |
| 2. Produksi susu segar | : | <u>2,75 Juta Ton.</u> |

Kondisi Riil di tahun 2020 :

- | | | |
|--|----------|-----------------------------|
| 1. Populasi sapi perah | : | <u>565.001</u> |
| (Data BPS 2019) | | |
| 2. Produksi susu segar (2019) : | | <u>0,95 Juta Ton</u> |

Kebijakan Tanpa Cetak Biru atau Blue Print

1. Tahun 1978 dapat dikatakan sebagai tonggak persusuan di tanah air. Pada saat itu May Jen Bustanil Arifin S.H sebagai Menmud Koperasi dan merangkap sebagai KaBULOG melakukan keberanian politik dengan "memaksa" IPS menyerap susu segar melalui koperasi. Susu segar yang sebelumnya diserap IPS sebagai basa basi dihargai hanya Rp. 60,-/liter dinaikkan menjadi Rp. 150 – Rp. 180,- per liter. Kebijakan ini telah memicu peternak untuk berbenah diri.
2. Kebijakan dilanjut dg impor sapi perah secara besar besaran dan dengan dukungan kredit dg Pola 72Kop yang relatif murah dan dijamin oleh Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.
3. Kebijakan wajib menyerap susu segar diperkuat dg SKB 3 Menteri yakni Menteri Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan dan Koperasi. Dalam SKB ini diatur kebijakan rasio penyerapan dengan ijin impor susu.
4. Tahun 1985 diterbitkan Inpres No. 2/1985 tentang Pembinaan Persusuan untuk memperkuat kebijakan dalam pengembangan persusuan di tanah air. Sebagai implementasi LOI IMF dengan Pemerintah Indonesia, Inpres No. 2/1985 dan SKB Tiga Menteri dieliminasi karena dianggap protektif dan menghalangi proses liberalisasi. Selanjutnya peternakan sapi perah harus berlaga di medan liberalisasi dan tanpa kawalan Pemerintah. Posisi tawar peternak lemah dan sangat tergantung pemasaran pada IPS.

MERANCANG KEBANGKITAN PERSUSUAN INDONESIA

Belajar dari perjalanan selama ini dan contoh dan kondisi riil di era sebelum reformasi dan juga *Blue Print* yang hanya menjadi slogan, sebenarnya untuk membangkitkan persusuan di tanah air banyak sekali jalan. Akan tetapi yang paling urgent dan harus segera dilakukan adalah "**keberanian dan komitmen politik**" dari Pemerintah untuk :

Pertama, segera terbitkan payung hukum selevel Inpres atau Kepres pengganti Inpres No. 2 tahun 1985. Isi payung hukum adalah keperpihakan secara nyata dari pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi perah rakyat khususnya.

Kedua, Pemerintah segera melaksanakan Program Susu untuk Anak sekolah dan Pesantren berbasis susu segar. Ini instrumen sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi mengembangkan peternakan sapi perah dan mengurangi ketergantungan pada IPS. Di sisi lain mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, pemerintah menyediakan dana untuk subsidi pengadaan sapi perah impor untuk mempercepat laju populasi. Dengan harga sapi impor sekarang ini tidak feasible untuk peternak sapi perah rakyat.

Keempat, tugaskan **Holding BUMN Pangan** untuk bekerjasama dengan peternak melalui wadah koperasinya agar usaha sapi perah semakin efisien dan modern. Pengembangan sapi perah rakyat harus dipermodern dengan pendekatan bisnis dan tidak hanya dengan aspek teknis semata.

Kelima, perlu diterbitkan pengaturan agar peternak sapi perah dapat ikut menikmati nilai tambah dari IPS. Jangan sampai peternak hanya penyedia bahan baku untuk IPS.

Jakarta 16 Juni 2021

Teguh Boediyana